

**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI



Nama : Mardani Nursali
NIM : 22 2012 110

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2017**

**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



Nama : Mardani Nursali
NIM : 22 2012 110

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2017**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota
Provinsi Sumatera Selatan
Nama : Mardani Nursali
NIM : 22 2012 110
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan
Pada tanggal 16-03-2017

Pembimbing

(Drs. Sunardi, SE., M.Si)
NIDN/NBM. 0205046303/784021

Mengetahui,
Dekan
u.b. Ketua Program Studi Akuntansi



(Betri Sirajuddin, SE., M.Si., Ak., CA)
NIDN/NBM. 0216106902/944806

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Judul : Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan
Nama : Mardani Nursali
NIM : 22 2012 110
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi dengan konsekuensinya.

Palembang, Februari 2017
Penulis,



Mardani Nursali

MOTTO :

Kebanyakan dari kita tidak mensyukuri apa yang sudah kita miliki, tetapi kita selalu menyesali apa yang belum kita capai.

(Mardani Nursali)

Kupersembahkan kepada :

- *Ayah dan Ibunda tercinta*
- *Saudara-saudaraku tersayang*
- *Para Pendidik yang Kuhormati*
- *Sahabat-sahabatku*
- *Almamaterku*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Sholawat dan salam tak terlupakan penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengeluarkan umat manusia dari kegelapan menuju cahaya benderang kepada sahabat, keluarga dan pengikutnya yang tetap istiqomah hingga akhir zaman.

Dalam skripsi ini, penulis menyadari masih banyak keiemanan dan kekurangan dalam penyajiannya yang tak lain disebabkan oleh terbatasnya kemampuan yang penulis miliki. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada kedua orang tuaku Ayahanda Muhammad Nur, S.Sos dan Ibunda tercinta Sarinah yang telah mendidik, membiayai, mendoakan dan memberikan dorongan semangat kepada penulis. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Drs. Sunardi, SE.,M.Si sebagai pembimbing yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan saran-saran dengan tulus ikhlas dan penuh kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu disampaikan juga terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam

penyelesaian studi ini dan tak lupa juga penulis menyampaikan ucapan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak DR. Abid Djazuli, S.E.,MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang dan seluruh staff beserta karyawan/ti
2. Bapak Drs. Fauzi Ridwan, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang dan seluruh staff beserta karyawan/ti
3. Bapak Betri Sirajuddin, SE.,M.Si.,Ak.,CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mizan, S.E.,M.Si.,Ak.,CA selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Drs. Sunardi, SE.,M.Si sebagai pembimbing yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan saran-saran dengan tulus ikhlas dan penuh kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh pimpinan, dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang atas bantuan dan perhatiannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang telah membantu penulis menyediakan data dan informasi tentang Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan yang dibutuhkan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Semua pihak yang telah ikut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Akhir kata penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun tidak sengaja, kesempurnaan hanya milik Allah SWT dan kekurangan mili penulis. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. *Amin ya robbal alamin.*

Palembang, Maret 2017
Penulis

Mardani Nursali

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN DEPAN/COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO.....	v
HALAMAN PRAKATA	vi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	ix
HALAMAN DAFTAR TABEL.....	xii
HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....	xiii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK.....	xv
BAR I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masaiah	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
BAR II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian sebelumnya	8
B. Landasan Teori	14
1. Pendapatan Asli Daerah	18
a) Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	18
b) Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah.....	19
2. Pajak Daerah.....	20
a) Pengertian Pajak Daerah	20
b) Jenis-Jenis Pajak Daerah	21
3. Retribusi Daerah.....	23
a) Pengertian Retribusi Daerah.....	23

b) Jenis Retribusi Daerah.....	24
C. Kerangka Berpikir	26
D. Hipotesis Penelitian.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	31
B. Lokasi Penelitian	32
C. Operasional Variabel.....	33
D. Data yang diperlukan.....	33
E. Metode Pengumpulan Data	34
F. Analisis Data dan Teknik Analisis	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian.....	43
1. Gambaran Umum Provinsi Sumatera Selatan.....	43
2. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)	46
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	56
1. Statistik Deskriptif	56
2. Uji Asumsi Klasik	58
3. Regresi Linier Berganda.....	62
4. Uji Hipotesis.....	63
5. Koefisien Determinasi.....	65
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan.....	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1. Realisasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011-2014 (<i>dalam jutaan rupiah dan ribu jiwa</i>)...	5
II.1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian	14
III.1. Definisi Operasional Variabel	33
IV.1. Hasil Statistik Deskriptif	57
IV.2. Hasil Statistik Deskriptif	58
IV.3. Hasil Uji Normalitas (<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>) ...	60
IV.4. Hasil Uji Multikolinieritas.....	61
IV.5. Hasil Uji Autokorelasi	63
IV.6. Hasil Regresi Linier Berganda	64
IV.7. Hasil Uji F	65
IV.8. Hasil Uji t.....	66
IV.9. Hasil Koefisien Determinasi.....	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1. Kerangka Pemikiran Teoritis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan	27
IV.1. Peta Provinsi Sumatera Selatan.....	45
IV.2. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)	50
IV.3. Hasil Uji Normalitas	59
IV.4. Hasil Uji Heterokedastisitas Menggunakan Scatterplot.....	61

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : Data Penelitian
2. Lampiran 2 : Hasil SPSS
3. Lampiran 3 : Sertifikat Membaca dan Menghafal Al Quran (Surat Pendek)
4. Lampiran 3 : Sertifikat Tes Tofel
5. Lampiran 4 : Surat Riset
6. Lampiran 5 : Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi
7. Lampiran 6 : Jadwal Penelitian
8. Lampiran 7 : Surat Keterangan Terjemahan Abstrak
9. Lampiran 7 : Biodata Penulis

ABSTRAK

Mardani Nursali /22 2012 110/2017/ Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah adakah pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian bermanfaat bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, peneliti dan almamater.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Variabel dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Data yang digunakan data sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Teknik analisis data yaitu analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, regresi linier berganda, uji hipotesis dan koefisien determinasi.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Terdapat pengaruh penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Terdapat pengaruh penerimaan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

Kata Kunci : *Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*

ABSTRACT

Mardani Nursali /22 2012 110/2017/ Effect of Acceptance of Local Taxes and Levies on revenue (PAD) District / City of South Sumatra Province.

The formulation of the problem in this research is there any influence Revenue Regional Tax and Retribution against revenue (PAD) District / City of South Sumatra Province. Helpful research for the Government of South Sumatra Province, researchers and almamater.

This research is a type of associative. The variable in this study is the Regional Income, Local Taxes and Levies. Data used secondary data with data collection using documentation. The analysis used in this study is a quantitative method. The data analysis technique that is descriptive statistical analysis, classical assumption test, multiple linear regression, hypothesis testing and coefficient of determination.

Results of research and discussion shows that there are significant acceptance Regional Tax and Retribution simultaneously to revenue (PAD) District / City Sumatera Province Regional Tax receipts Selatan.Terdapat effect on revenue (PAD) District / City Sumatera Selatan.Terdapat acceptance influence Levies on revenue (PAD) District / City of South Sumatra Province.

Keywords : Regional Income, Local Taxes and Levies

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang terbagi atas beberapa provinsi dan setiap provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten/kota yang juga setiap kabupaten/kota memiliki pemerintah daerah. Banyaknya daerah di Indonesia membuat pemerintah pusat sulit mengkoordinasi pemerintahan yang ada di daerah-daerah. Sehingga untuk memudahkan pelayanan dan penataan pemerintahan, maka pemerintah pusat mengubah kebijakan yang tadinya berasas sentralisasi menjadi desentralisasi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Wujud dari kebijakan desentralisasi tersebut adalah lahirnya otonomi daerah.

Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuan implementasi otonomi daerah antara lain untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Sumber keuangan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga mampu mendorong perekonomian dan pembangunan daerah tersebut, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi). Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dari segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah.

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah yang memiliki kontribusi yang sangat penting dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah karena pajak daerah bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan juga mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah

Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak.

Retribusi daerah yang merupakan pembayaran atas jasa atau pemberian ijin khusus yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemda kepada pribadi/badan, diharapkan dapat mendukung sumber pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah, sehingga akan meningkatkan dan pemeratakan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat di daerahnya

Retribusi daerah dipungut atas balas jasa sehingga pembayarannya dapat dilakukan berulang kali. Siapa yang menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dapat dikenakan retribusi. Faktor perbedaan antara pungutan retribusi dengan sumber-sumber pendapatan yang lain adalah ada tidaknya jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah. Pelaksanaan

pemungutan retribusi dapat dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan oleh petugas perundang-undangan selama pemerintah daerah dapat menyediakan jasa dengan persetujuan pemerintah pusat. Sektor retribusi terkait erat oleh tingkat aktivitas sosial ekonomi masyarakat di suatu daerah. Artinya, semakin maju dan berkembang tingkat sosial ekonomi masyarakat, maka semakin besar potensi retribusi yang bisa dipungut.

Jumlah Penduduk adalah satu indikator penting dalam suatu Negara. Jumlah penduduk merupakan input yang potensial yang dapat digunakan sebagai faktor produksi untuk meningkatkan produksi suatu rumah tangga perusahaan. Semakin banyak penduduk maka semakin banyak pula tenaga kerja yang dapat digunakan. Oleh karena jumlah penduduk terus bertambah, maka banyak yang harus dicanangkan untuk mengatasi keadaan jumlah penduduk yang semakin bertambah.

Sumatera Selatan adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di bagian selatan Pulau Sumatera dengan jumlah penduduk pada tahun 2015 sebesar 8.052 jiwa. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan tercatat tumbuh positif ditengah masih melambatnya ekonomi dunia. Realisasi pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan di triwulan I 2016 sebesar 4,94% lebih tinggi dari realisasi pertumbuhan ekonomi di triwulan IV 2015 yang berada pada level 3,94%. Realisasi triwulan ini juga tercatat lebih tinggi dari triwulan I 2015 yang sebesar 4,58%. Tiga sektor utama yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan, dan sektor industri pengolahan menjadi sumber utama Pertumbuhan sedangkan konsumsi rumah tangga dan investasi mengalami perbaikan yang signifikan.

Tabel I.1
Realisasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011-2014
(dalam jutaan rupiah)

Kabupaten/Kota	Tahun	PAD	PD	RD
Lahat	2011	70,065	15,728	13,213
	2012	70,937	20,094	17,643
	2013	78,313	24,661	23,597
	2014	128,331	60,867	26,164
Musi Banyuasin	2011	80,644	20,157	8,059
	2012	96,732	18,394	1,615
	2013	112,649	19,681	2,506
	2014	175,937	64,593	5,360
Musi Rawas	2011	65,427	8,496	3,122
	2012	73,018	13,934	2,747
	2013	75,367	18,287	3,408
	2014	123,165	48,861	4,168
Muaraninim	2011	86,937	23,365	13,680
	2012	119,455	28,610	8,917
	2013	125,111	36,251	12,511
	2014	141,718	50,819	14,600
OKI	2011	47,387	13,209	6,749
	2012	54,618	13,590	12,626
	2013	68,701	23,103	20,493
	2014	148,603	83,477	11,598
OKU	2011	42,119	16,422	6,407
	2012	41,429	15,631	11,637
	2013	44,680	17,080	13,607
	2014	82,356	26,899	3,191
Palembang	2011	349,569	207,746	8,519
	2012	518,858	333,104	80,007
	2013	558,705	357,230	106,871
	2014	737,231	466,587	118,318
Prabumulih	2011	32,107	4,278	4,793
	2012	42,679	8,124	1,257
	2013	50,623	14,339	2,118
	2014	66,854	18,727	3,250
Pagar Alam	2011	14,876	2,532	6,284
	2012	34,791	6,151	963
	2013	41,693	17,626	1,845
	2014	53,193	20,870	4,948
Lubuk Linggau	2011	34,302	12,127	10,912
	2012	4,603	3,545	4,575
	2013	81,364	31,069	5,461
	2014	109,930	54,711	30,835
Banyuasin	2011	29,781	10,445	4,922
	2012	67,767	25,771	6,129
	2013	22,080	6,244	24,074
	2014	52,073	13,567	4,981
Ogan Ilir	2011	21,848	6,439	6,797
	2012	31,742	15,635	2,635
	2013	36,918	11,686	5,959
	2014	65,430	20,645	11,133
OKU Timur	2011	30,631	9,817	6,980
	2012	34,833	10,566	14,767
	2013	22,897	5,830	17,630
	2014	36,327	10,424	6,461
OKU Selatan	2011	13,676	2,532	3,100
	2012	18,948	3,648	963
	2013	24,230	8,943	1,845
	2014	35,668	14,880	3,531
Empat Lawang	2011	18,479	6,093	9,360
	2012	21,467	8,426	4,548
	2013	41,356	9,452	2,993
	2014	44,368	12,464	6,348
Jumlah		5,555,596	2,454,482	783,730

Sumber : <http://www.djpk.depkeu.go.id>

Keterangan :

PAD : Pendapatan Asli Daerah

PD : Pajak Daerah

RD : Retribusi Daerah

Berdasarkan data di atas, realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera pada tahun 2011-2014 mengalami fluktuasi hal ini dikarenakan tidak lagi jasa *saving* dana giro, deposito dan permasalahan pendapatan yang dihadapi Provinsi Sumatera Selatan saat ini, sebagai akibat penurunan target dana perimbangan/transfer dari pemerintah pusat dan tertundanya penyaluran sebagian dana tersebut sehingga tidak tercapainya target pendapatan pemerintah. Dari data di atas dapat dilihat bahwa pajak daerah memegang peranan yang sangat dominan dibanding penerimaan yang lainnya.

Dari penjelasan diatas, maka untuk mengetahui penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD dapat dilakukan melalui penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, makah tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui pengaruh Penerimaan Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan :

a. Bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam mengambil keputusan atau kebijakan yang berkaitan dengan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara tidak langsung akan meningkatkan PAD sehingga dapat menunjang perekonomian daerah guna tercapainya kesejahteraan masyarakat. .

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini berguna untuk meningkatkan pemahaman berkaitan dengan akuntansi sektor publik yang telah dipelajari di bangku perkuliahan.

c. Bagi Almamater

Sebagai referensi bagi para peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Kajian ini berguna untuk memberikan gambaran dan mempelajari kerangka pembahasan. Disamping itu juga bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan.

- 1) Ida Mentayani (2014) dengan judul pengaruh penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Desain penelitian ini adalah penelitian pengujian hipotesis (*hypothesis testing*) yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang diajukan oleh peneliti. Populasi penelitian adalah seluruh daerah kota dan kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 2 buah kota dan 11 buah Kabupaten. Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan teknik dokumentasi. Data yang diperoleh dikumpulkan dari BPS Provinsi Kalimantan Selatan berupa data Laporan Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten dan Kota Provinsi Kalimantan Selatan selama 5 tahun periode tahun 2007-2011.

Secara individual variabel pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap PAD secara keseluruhan. Untuk periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 diketahui total keseluruhan realisasi penerimaan pajak daerah untuk 13 Kabupaten/Kota adalah sebesar Rp.558,49 milyar dan total keseluruhan realisasi penerimaan retribusi

daerahnya adalah sebesar Rp.586,77 milyar sehingga total kedua penerimaan tersebut adalah sebesar Rp.1.145,26 milyar. Total PAD untuk 13 Kabupaten/Kota selama periode tahun yang diteliti adalah sebesar Rp.2.185,39 milyar. Sehingga dapat diketahui sumbangan dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama kepada PAD adalah sebesar 52,40% dan sisanya adalah sumbangan dari sektor hasil perusahaan daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan sektor lain-lain PAD yang sah.

Besarnya persentase yang dihasilkan oleh pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama sesuai dengan hasil hipotesis yakni uji F yang menghasilkan hasil positif sebesar 80,545 dengan tingkat signifikan (0,000). Hal ini membuktikan dan menerima hipotesis H3 yaitu penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap peningkatan PAD.

- 2) Adi Nugroho (2013) Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2010-2012. Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBD pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah untuk periode 2010-2012. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sedangkan sumber data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari dokumen, informasi, data-data mengenai pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Data yang digunakan dalam

penelitian ini merupakan data *time series* (runtut waktu) selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 meliputi data : pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang positif dengan nilai koefisien 1,482, yang berarti bahwa penambahan 1 satuan maka pendapatan asli daerah akan mengalami kenaikan sebesar Rp. 1,482. Hal ini menunjukkan apabila penambahan pajak daerah yang tinggi akan mempengaruhi penambahan pendapatan asli daerah. Namun sebaliknya, apabila penambahan pajak daerah yang rendah maka penambahan pendapatan asli daerah juga ikut rendah.

Pajak daerah tertinggi pada Kota Semarang pada tahun 2012 sebesar Rp. 487.142.179. Sedangkan pajak daerah terendah pada Kabupaten Wonosobo pada tahun 2010 sebesar Rp. 5.470.000. Rata-rata penerimaan pajak daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2010 sampai 2012 adalah sebesar Rp. 26.997.327. Berdasarkan data pada lampiran dapat dilihat ada 35 Kabupaten/Kota yang pajak daerah nya mengalami peningkatan dari tahun 2010 ke tahun 2011 dan diikuti dengan kenaikan pendapatan asli daerah sebanyak 30 Kabupaten/Kota. Sedangkan pada tahun 2011 ke tahun 2012 pajak daerah menurun menjadi 33 Kabupaten/Kota dan pendapatan asli daerah meningkat menjadi 32 Kabupaten/Kota.

Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang positif dengan nilai koefisiensi 0,506 , yang berarti bahwa penambahan 1 satuan maka pendapatan asli daerah akan mengalami kenaikan sebesar Rp 0,506. Hal ini menunjukkan apabila penambahan retribusi daerah yang tinggi akan mempengaruhi penambahan pendapatan asli daerah. Namun sebaliknya, apabila penambahan retribusi daerah yang rendah maka penambahan pendapatan asli daerah juga ikut rendah.

Retribusi daerah tertinggi pada Kota Semarang pada tahun 2012 sebesar Rp. 99.421.615. Sedangkan retribusi daerah terendah pada Kota Magelang pada tahun 2011 sebesar Rp. 4.435.191. Rata-rata penerimaan retribusi daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2010 sampai 2012 adalah sebesar Rp. 27.116.353. Berdasarkan data pada lampiran dapat dilihat ada 23 Kabupaten/Kota yang retribusi daerah nya mengalami peningkatan dari tahun 2010 ke tahun 2011 dan diikuti dengan kenaikan pendapatan asli daerah sebanyak 30 Kabupaten/Kota. Pada tahun 2011 ke tahun 2012 retribusi daerah menurun menjadi 18 Kabupaten/Kota dengan pendapatan asli daerah meningkat menjadi 32 Kabupaten/Kota.

- 3) Peber Antonius Sinaga (2015) Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Musi Rawas (Studi Empiris pada Kantor DPPKAD Kab Musi Rawas). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Populasi penelitian ini adalah Kabupaten Musi Rawas. Penelitian ini menggunakan data realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang diambil selama kurun waktu 4 tahun, mulai tahun 2011 sampai dengan 2014. Data-data tersebut diperoleh dari kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Hasil regresi menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pada penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, dan pada penerimaan hasil retribusi daerah tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah memberikan sumbangan yang cukup besar pada pendapatan asli daerah, sedangkan pada penerimaan hasil retribusi daerah masih memberikan sumbangan yang rendah pada pendapatan asli daerah.

Tabel II.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Pengaruh penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Ida Mentayani (2014)	Sama-sama meneliti Pendapatan Asli Daerah	Perbedaannya terletak pada objek penelitian sebelumnya dilakukan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan sedangkan penelitian sekarang di Provinsi Sumatera Selatan
2	Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2010-2012. Adi Nugroho (2013)	Sama-sama meneliti Pendapatan Asli Daerah	Perbedaannya terletak pada objek penelitian sebelumnya dilakukan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah sedangkan penelitian sekarang di Provinsi Sumatera Selatan
3	Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Musi Rawas (Studi Empiris pada Kantor DPPKAD Kab Musi Rawas) Peber Antonius Sinaga (2015)	Sama-sama meneliti Pendapatan Asli Daerah	Perbedaannya terletak pada objek penelitian sebelumnya dilakukan pada Kabupaten Musi Rawas sedangkan penelitian sekarang di Provinsi Sumatera Selatan

Sumber : Penulis, 2016

B. Landasan Teori

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber utama pendapatan daerah, memegang peranan penting dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal kepada publik melalui tersedianya berbagai barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat (*public goods* dan *service*), diharapkan masyarakat taat dan sadar akan pajak. Berkaitan dengan hal itu, fungsi pajak

daerah dan retribusi daerah pada masa otonomi daerah tetap berfungsi sebagai *budgeter* dan *regulerend*, tetapi kedua fungsi tersebut, semata-mata harus ditunjukkan untuk memberikan pelayanan guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. Fungsi pokok pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada rakyat yang utamanya dibiayai dari pajak daerah dan retribusi daerah akan menjadi bahasan utama dalam penelitian apabila menggunakan teori *Welfare State* dan *Teori Utility* sebagai pisau analisis.

Alasan menggunakan teori *Welfare State* karena berkaitan dengan asas teori ini yang menghendaki adanya kewajiban pemerintah untuk memberikan kesejahteraan dalam bentuk pelayanan kepada rakyat yang telah dirumuskan oleh *founding fathers* Indonesia sejak awal berdirinya NKRI. Cita-cita tersebut terumuskan dalam alinea kedua dan keempat Pembukaan UUD 1945 dan masih tetap relevan dengan berbagai perkembangan dan kebutuhan rakyat hingga saat ini, terutama dalam kaitannya dengan perpajakan dan otonomi daerah. Selain *Teori Welfare State*, sebagai *grand theory*, *teori utility* juga sangat tepat sebagai penunjang *grand theory* karena perwujudan kesejahteraan rakyat tersebut harus betul-betul diarahkan secara efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan rakyat. Berikut ini uraian mengenai teori tersebut.

a. *Teori Welfare State*

Prinsip dasar teori *Welfare State*, yakni bahwa negara/pemerintah bertanggung jawab penuh untuk menyediakan semua kebutuhan rakyatnya dan tidak dapat dilimpahkan kepada siapapun (Abercrombie, 2008 : 382).

Konsep kesejahteraan (*sosial welfare*) tersebut secara konkret ke dalam bentuk model program kesejahteraan masyarakat bagi hasil pemerintah modern (*The model of modern government social security*).

Ditinjau dari sudut negara, *Welfare State* diklasifikasikan sebagai salah satu tipe negara, yaitu tipe negara kemakmuran (*Woblfahrt Staats*). Pada tipe negara *Welfare state* tersebut negara mengabdikan sepenuhnya kepada masyarakat. Negara sebagai salah satu institusi yang berkewajiban untuk menyelenggarakan kemakmuran rakyat dan kepentingan seluruh rakyat. Menurut *Dicey Rule of law* mengandung tiga unsur yakni *equality before the law*, setiap manusia mempunyai kedudukan hukum yang sama dan mendapatkan perlakuan yang sama *supremation of law*, kekuasaan tertinggi terletak pada hukum, dan *constitution bases on human right*, konstitusi harus mencerminkan hak-hak asasi manusia.

Perkembangan *rule of law* menjadi *Welfare State* dapat dilihat dari serangkaian kelengkapan kegiatan negara Inggris dalam menyelenggarakan kemakmuran bagi rakyatnya. Kegiatan tersebut berupa jaminan sosial, program jaminan kesehatan nasional, nasionalisasi perusahaan swasta yang menyangkut kepentingan umum dan kesempatan menikmati pendidikan lanjutan dan tinggi bagi ekonominya yang kurang mampu.

b. Teori Kemanfaatan (*Utility*)

Pada pengelolaan pajak agar sesuai dengan makna otonomi daerah, pemanfaatannya harus diupayakan untuk pelayanan pada sektor pajak

yang bersangkutan. Apabila pembayar pajak dapat merasakan manfaat atas pembayarannya, diharapkan timbul kesadaran untuk melakukan pembayaran secara sukarela. Pemungutan pajak daerah harus mempertimbangkan asas kemanfaatan bagi pemerintah daerah itu sendiri. Secara umum pemungutan pajak daerah harus dilihat dari dua sisi yakni, sisi hasil guna dan daya guna bagi pemerintah daerah dan masyarakat daerah bersangkutan.

Paling tidak ada lima tolak ukur untuk menilai apakah pendapatan asli daerah, pajak daerah dan retribusi daerah yang ada sudah layak, salah satu di dalamnya adalah berkaitan dengan asas kemanfaatan (daya guna ekonomi). Kelima tolak ukur tersebut sebagai berikut.

- 1) Hasil (*Yield*): memadai tidaknya hasil suatu pajak daerah dalam kaitannya dengan berbagai layanan yang dibiayainya, yakni stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besar hasil itu, dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk dan sebagainya, juga perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut.
- 2) Keadilan (*Equality*): dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang, pajak bersangkutan harus adil secara horizontal, artinya beban pajak haruslah sama besar antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama, harus adil secara vertikal, artinya kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi yang lebih besar memberikan sumbangan yang lebih besar dari pada kelompok yang tidak banyak memiliki sumber daya

ekonomi. Pajak haruslah adil dari tempat ke tempat dalam arti, hendaknya tidak ada perbedaan-perbedaan besar dan sewenang-wenang dalam beban pajak dari satu daerah ke daerah lain, kecuali jika mencerminkan perbedaan dalam cara menyediakan layanan masyarakat.

- 3) Daya guna ekonomi (*Economic Efficiency*): pajak hendaknya mendorong (atau setidaknya tidak menghambat) penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi, mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan pilihan produsen menjadi salah arah atau memperkecil „beban pajak“.
- 4) Kemampuan melaksanakan (*Ability to Implement*): suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan, dari sudut kemauan politik dan kemampuan tata usaha.
- 5) Kecocokan atau sumber penerimaan daerah (*Suitability as a Local Revenue Source*): berarti haruslah jelas kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan dan tempat memungut pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak. Pajak tidak mudah dihindari, dengan cara memindahkan objek pajak dari suatu daerah ke daerah lain. Pajak daerah jangan hendaknya mempertajam perbedaan-perbedaan daerah dari segi potensi ekonomi masing-masing dan pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah.

1. Pendapatan Asli Daerah

a) Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pemerintah daerah harus dapat menjalankan rumahtangganya secara mandiri dan dalam upaya peningkatan kemandirian tersebut pemerintah dituntut untuk mampu meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah, jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan bertambah sehingga mampu mendorong tingkat kemandirian daerah tersebut.

Menurut Mardiasmo (2012 : 132), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Halim (2007 : 96), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Dari definisi Pendapatan Asli Daerah yang dikemukakan oleh beberapa ahli di atas pada dasarnya memiliki karakteristik yang sama. Maka dari itu penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa pendapatan asli daerah adalah segala penerimaan daerah setempat yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

b) Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah

Klasifikasi PAD berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terdiri dari Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Jenis lain-lain PAD yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan

denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi.

Menurut Halim (2014:67) PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah.

2. Pajak Daerah

a) Pengertian Pajak Daerah

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan Undang-Undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan Undang-Undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan. Dengan demikian, akan terjamin bahwa kas Negara selalu berisi uang pajak. Selain itu, pengenaan pajak berdasarkan Undang-Undang akan menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum bagi pembayar pajak sehingga pemerintah tidak dapat sewenang-wenang menetapkan besarnya pajak.

Menurut Mardiasmo (2009 ; 21), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan pajak daerah itu sendiri menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari definisi di atas, penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerahnya tanpa imbalan yang langsung dapat dirasakan, yang bersifat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah setempat.

b) Jenis-Jenis Pajak Daerah

Menurut Siahaan (2010;64) pajak kabupaten atau kota yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- 7) Pajak Parkir
- 8) Pajak Air Tanah
- 9) Pajak Sarang Burung Walet
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Dari jenis pajak, Kabupaten atau Kota dapat tidak memungut salah satu dari beberapa jenis pajak yang telah ditentukan apabila potensi pajak di daerah Kabupaten atau Kota tersebut dipandang kurang memadai.

Dari jenis pajak, Kabupaten atau Kota dapat tidak memungut salah satu dari beberapa jenis pajak yang telah ditentukan apabila potensi pajak di daerah Kabupaten atau Kota tersebut dipandang kurang memadai.

3. Retribusi Daerah

a. Pengertian Retribusi Daerah

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia saat ini penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Jadi, retribusi yang dipungut di Indonesia dewasa ini adalah retribusi daerah.

Menurut Indra Bastian (2011:156), retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas pelayanan dan penggunaan fasilitas-fasilitas umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah bagi kepentingan masyarakat, sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Menurut Mursyidi (2009:135) retribusi dipungut oleh pemerintah daerah karena pemberian ijin atau jasa kepada orang pribadi atau badan.

Retribusi menurut Siahaan (2010:5) adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan.

Dari definisi retribusi yang dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dari itu, penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pelayanan dan penggunaan fasilitas yang disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari Negara.

b. Jenis Retribusi Daerah

Menurut Siahaan (2010;620) penggolongan jenis retribusi dimaksudkan guna menetapkan kebijakan umum tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi daerah. Sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 2 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 108 ayat 2-4, retribusi daerah dibagi atas tiga golongan, sebagaimana disebut di bawah ini:

- 1) Retribusi Jasa Umum
- 2) Retribusi Jasa Usaha
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 149 ayat 2-4, penetapan jenis retribusi jasa umum dan retribusi perizinan tertentu untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota disesuaikan dengan kewenangan daerah masing-masing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal yang sama juga berlaku untuk penetapan jenis retribusi jasa usaha untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota, dilakukan sesuai dengan jasa/pelayanan yang diberikan oleh daerah masing-masing. Rincian jenis objek dari setiap retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu diatur dalam peraturan daerah yang bersangkutan.

Jenis-jenis retribusi jasa umum, usaha dan perizinan tertentu saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 127-138, sebagaimana di bawah ini.

Jenis-jenis retribusi jasa umum

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akte Catatan Sipil.
- 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat.
- 5) Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.
- 6) Retribusi Pelayanan Pasar

Jenis-jenis retribusi jasa usaha

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- 2) Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan
- 3) Retribusi Tempat Pelelangan
- 4) Retribusi Terminal
- 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir
- 6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
- 7) Retribusi Rumah Potong Hewan
- 8) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
- 9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- 10) Retribusi Penyeberangan di Air
- 11) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

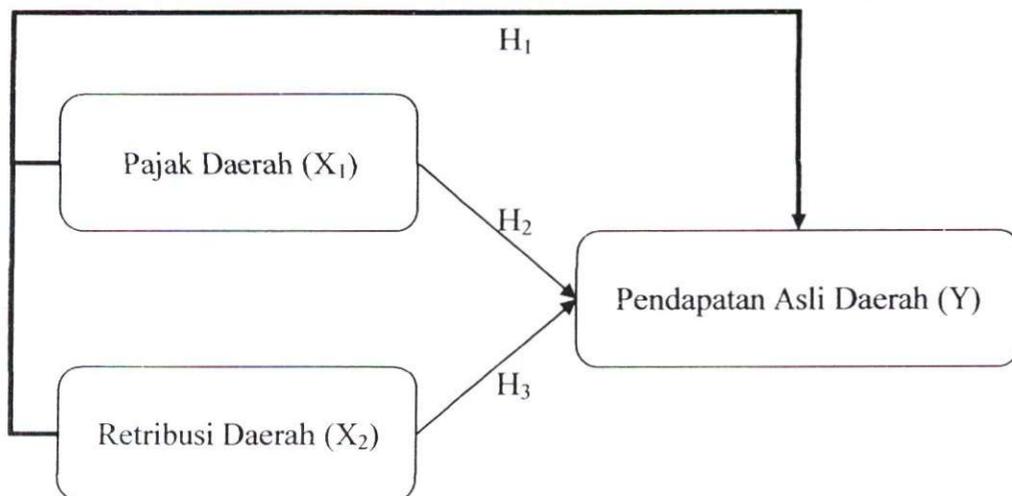
Jenis-jenis retribusi Perizinan Tertentu

- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- 3) Retribusi Izin Trayek Angkutan Umum
- 4) Retribusi Izin Usaha Perikanan

C. Kerangka Berpikir

Berdasarkan kajian pustaka dan hasil penelitian lain yang telah penulis tampilkan pada sub-bab sebelumnya, pada bagian ini penulis mencoba untuk menguraikan kerangka berpikir sendiri secara deduktif yang menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum dengan melibatkan sejumlah variabel pada penelitian ini dan menjelaskan keterkaitannya secara sistematis dalam sebuah teori mini untuk diuji kebenarannya. Variabel yang lebih ditekankan pada penelitian ini khususnya mengenai pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Untuk itu bisa digambarkan dalam kerangka berfikir yang dirumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut :

Gambar II.1
Kerangka Pemikiran Teoritis
Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan



Keterangan :

———— Pengaruh Secara Simultan

———— Pengaruh Secara Parsial

Sumber : Penulis, 2016

D. Hipotesis Penelitian

1. Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara Simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil

ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi). Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dan segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah. Jadi hipotesis yang dikembangkan yaitu :

H_1 : Terdapat pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara Simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

2. Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara Parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

a) Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah yang memiliki kontribusi yang sangat penting dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah karena pajak daerah bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan penerimaan PAD dan juga mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan,

sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Jadi hipotesis yang dikembangkan yaitu :

H₂ : Terdapat pengaruh Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

b) Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

Retribusi daerah yang merupakan pembayaran atas jasa atau pemberian izin khusus yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemda kepada pribadi/badan, diharapkan dapat mendukung sumber pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah, sehingga akan meningkatkan dan pemeratakan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat di daerahnya.

Retribusi daerah dipungut atas balas jasa sehingga pembayarannya dapat dilakukan berulang kali. Siapa yang menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dapat dikenakan retribusi. Faktor perbedaan antara pungutan retribusi dengan sumber-sumber pendapatan yang lain adalah ada tidaknya jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah. Pelaksanaan pemungutan retribusi dapat dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan

oleh petugas perundang-undangan selama pemerintah daerah dapat menyediakan jasa dengan persetujuan pemerintah pusat. Sektor retribusi terkait erat oleh tingkat aktivitas sosial ekonomi masyarakat di suatu daerah. Artinya, semakin maju dan berkembang tingkat sosial ekonomi masyarakat, maka semakin besar potensi retribusi yang bisa dipungut. Jadi hipotesis yang dapat dikembangkan adalah :

H₃ : Terdapat pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2013 : 56) berdasarkan tingkat eksplanasinya penelitian dibagi tiga yaitu penelitian deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Eksplanasi artinya penjelasan, tingkat eksplanasi artinya tingkat atau kadar penjelasan.

a. Penelitian Deskriptif

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri, tanpa dibandingkan atau dihubungkan dengan variabel lain. Peneliti berusaha mendapatkan data apa adanya kemudian menggambarkan (mendeskripsikan) apa adanya. Penelitian Deskriptif dibagi menjadi dua yakni metode deskriptif kuantitatif dan metode deskriptif kualitatif.

b. Penelitian Komparatif

Penelitian komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan dua variabel atau lebih. Kedua variabel bisa jadi tidak berhubungan atau mandiri. Tujuan penelitian ini antara lain untuk bisa menentukan mana yang lebih baik atau mana yang sebaiknya dipilih.

c. Penelitian Asosiatif

Penelitian asosiatif adalah penelitian yang berusaha mencari hubungan antara satu variabel dengan variabel lain. Hubungannya bisa simetris,

kausal, atau interaktif. Hubungan simetris adalah hubungan antara dua variabel yang bersifat sejajar, sama. Hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab-akibat. Salah satu variabel (independen) mempengaruhi variabel yang lain (dependen). Hubungan interaktif adalah hubungan antara variabel yang saling mempengaruhi.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif adalah penelitian yang berusaha mencari pengaruh antara satu variabel atau lebih terhadap variabel lain.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang beralamat di Jalan DR. Wahidin No.1 Gedung Radius Prawiro Lantai 9 Jakarta Pusat 10710. <http://www.djpk.depkeu.go.id>

C. Operasionalisasi Variabel

Operasional variabel merupakan variabel yang dijadikan sebagai objek dalam suatu penelitian bertitik tolak dari kerangka berfikir dan hipotesis yang diuraikan sebelumnya, maka variabel yang hendak diteliti terdiri dari tiga variabel yaitu :

Tabel III.1
Definisi Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
Pendapatan Asli Daerah (Y)	Penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah Provinsi Sumatera Selatan	Tingkat Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011-2014
Pajak Daerah (X ₁)	Iuran wajib yang dilakukan oleh orang/badan kepada daerahnya tanpa imbalan yang langsung dapat dirasakan oleh wajib pajak.	Tingkat Realisasi Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011-2014
Retribusi Daerah (X ₂)	Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa dan penggunaan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah tersebut untuk kepentingan orang/badan.	Tingkat Realisasi Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011-2014

Sumber : Peneliti berdasarkan berbagai teori, 2016

D. Data yang diperlukan

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari :

1. Data Primer

Semua data yang dikumpulkan dan diolah sendiri secara langsung oleh peneliti dari objek yang diteliti oleh perorangan maupun oleh suatu organisasi.

2. Data Sekunder

Data yang telah diolah dan diperoleh dari buku-buku *literature-literature*, majalah, jurnal dan berbagai laporan yang dikeluarkan oleh instansi/perusahaan yang bersangkutan dan mempunyai hubungan yang

erat dengan permasalahan skripsi ini dan tidak menyimpang dari maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yaitu Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah 15 Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011-2014.

E. Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2014 : 401) dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Interview (Wawancara)

Interview merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian.

2. Kuesioner (Angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara member seperangkat atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk menjawabnya,

3. Pengamatan (Observasi)

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bias berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dokumentasi yaitu penulis mengumpulkan beberapa informasi berupa data Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan data penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan website <http://www.djpk.depkeu.go.id>.

F. Analisis Data dan Teknik Analisis

1) Analisis Data

Menurut Soeratno dan Arsyad (2012 : 69) menyatakan bahwa teknik analisis data dapat digunakan dengan dua metode yaitu :

a) Metode Kualitatif

Analisis yang dinyatakan berupa informasi (bukan angka) baik lisan maupun tulisan yang bersifat mendukung dengan data kuantitatif.

b) Metode Kuantitatif

Analisis yang dinyatakan berupa angka yang bertujuan untuk menunjukkan pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dengan penafsiran angka statistik.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif yang dinyatakan dalam angka dan dapat diukur secara sistematis menggunakan program SPSS. Untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan.

2) Teknik Analisis

a) Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif berusaha menjelaskan atau menggambarkan berbagai karakteristik data selain penyajian tabel dan grafik untuk mengetahui deskripsi data diperlukan ukuran yang lebih eksak. Dua ukuran penting yang sering dipakai dalam pengambilan keputusan adalah :

- a) Mencari *central tendency* (kecenderungan terpusat) seperti mean, median dan modus.
- b) Mencari ukuran *dispersion* seperti range, standar deviasi dan varians

b) Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Untuk melakukan uji normalitas distribusi data, penulis menggunakan uji *Kolmogorof Smirnov* dari program SPSS. Normalitas distribusi data dihitung dengan cara membandingkan

nilai *Asymptotic Significance* yang diperoleh dengan nilai $\alpha = 0,05$. Apabila $\text{Asymp Sig} > \alpha = 0,05$ maka data dinyatakan normal.

2. Uji Multikolinearitas

Multikolinieritas merupakan situasi dimana terjadi korelasi berganda yang sangat tinggi, jika salah satu dari variabel-variabel bebas berregresi terhadap variabel bebas yang lain. Seperti dikatakan Rietvelt (2013 : 16). Multikolinieritas memiliki arti adanya korelasi diantara dua atau lebih variabel bebas. Berarti jika diantara variabel yang digunakan sama sekali tidak berkorelasi antara satu dengan yang lain atau berkorelasi tetapi tidak lebih tinggi dari r , maka bisa dikatakan tidak terjadi multikolinieritas. Uji asumsi multikolinieritas ini dilakukan dengan cara menghitung nilai *Variance Inflating Factor* (VIF), apabila VIF lebih kecil dari 5 maka berarti tidak terjadi multikolinieritas (Santoso, 2012). Sementara itu dalam referensi lain disebutkan nilai kritik untuk nilai VIF adalah 10.

3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji

= 5%. Apabila D-W > Durbin-Watson (D-W) dengan tingkat kepercayaan terletak antara -2 sampai +2 maka tidak ada autokorelasi (Santoso, 2012)

4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain, jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan Uji Glejser, yang dilakukan dengan meregresikan nilai absolut residual yang diperoleh dari model regresi sebagai variabel dependen terhadap variabel independen dalam model regresi. Apabila nilai koefisien regresi dari masing-masing variabel bebas dalam model regresi ini tidak signifikan secara statistik, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas (Sumodiningrat, 2011)

c) Regresi Linier Berganda

Pengolahan data akan dikaji menggunakan alat analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda digunakan untuk menjawab rumusan masalah, dengan menggunakan persamaan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

Dimana

- a = Nilai konstanta
- b_1 = Koefisien regresi Pajak Daerah
- b_2 = Koefisiensi regresi Retribusi Daerah
- X_1 = Variabel Pajak Daerah
- X_2 = Variabel Retribusi Daerah
- Y = Variabel Pendapatan Asli Daerah
- e = eror (item)

d) Uji Hipotesis

1. Uji secara Simultan (Uji F)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan dapat berpengaruh terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah. Cara yang digunakan adalah dengan membandingkan nilai F hitung hingga F tabel dengan ketentuan sebagai berikut :

Langkah-langkah pengujian hipotesis :

- a. Formulasi H_0 dan H_a
 - 1) H_0 : Tidak ada pengaruh penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.
 - 2) H_a : Ada pengaruh penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan

- b. Menentukan nilai F tabel dengan tingkat keyakinan 95% tingkat kesalahan (α) 5% = 0,05 dan derajat kebebasan $df_1 = k$, k = Jumlah variabel bebas, $df_2 = n-k-1$ dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 - c. Menarik Kesimpulan
 - 1) H_0 ditolak dan H_a diterima apabila $F_{hitung} \geq F_{tabel}$ atau $Sig F < \alpha$ (0,05) artinya ada pengaruh penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.
 - 2) H_0 diterima dan H_a ditolak apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau $Sig F > \alpha$ (0,05) artinya tidak ada pengaruh penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.
2. Uji secara Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Uji t dilakukan dengan membandingkan t hitung terhadap t tabel dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Formulasi H_0 dan H_a
 - 1) H_0 : Tidak ada pengaruh penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.
 - 2) H_a : Ada pengaruh penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.
- b. Menentukan harga t hitung dengan tingkat keyakinan 95% tingkat kesalahan (α) 5% = 0,05 dan derajat kebebasan, $df = n - 2 =$ signifikan terhadap variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.
- c. Menarik Kesimpulan
 - 1) H_0 ditolak dan H_a diterima apabila $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ atau $Sig\ t < \alpha$ (0,05) artinya ada pengaruh penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan
 - 2) H_0 diterima dan H_a ditolak apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $Sig\ t < \alpha$ (0,05) artinya tidak ada pengaruh penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

3. Koefisien Determinasi

Analisis ini digunakan untuk mengambil seberapa jauh variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat, maka perlu diketahui nilai koefisien determinasi atau penentuan R^2 . Nilai R^2 ini berkisar antara 0-1, semakin mendekati 1 nilai R^2 tersebut berarti semakin besar variabel independen mampu menerangkan variabel dependen. Analisis terhadap nilai R-square (R^2) ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana variabel bebas (X) dapat menerangkan hubungan perubahan variabel terikat (Y). Sifat-sifat R-square sangat dipengaruhi oleh banyak variabel bebas dimana semakin banyak variabel bebas semakin besar nilai R-square.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Provinsi Sumatera Selatan

a. Kondisi Geografis

Provinsi Sumatera Selatan secara geografis terletak antara 1 derajat sampai 4 derajat Lintang Selatan dan 102 derajat sampai 106 derajat Bujur Timur dengan luas daerah seluruhnya 87.017.41 km². Batas batas wilayah Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut : sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Jambi, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Lampung, sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Bangka Belitung, sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Bengkulu.

Secara topografi, wilayah Provinsi Sumatera Selatan di pantai Timur tanahnya terdiri dari rawa-rawa dan payau yang dipengaruhi oleh pasang surut. Vegetasinya berupa tumbuhan palmase dan kayu rawa (bakau). Sedikit makin ke barat merupakan dataran rendah yang luas. Lebih masuk kedalam wilayahnya semakin bergunung-gunung. Disana terdapat bukti barisan yang membelah Sumatera Selatan dan merupakan daerah pegunungan dengan ketinggian 900 - 1.200 meter dari permukaan laut. Bukit barisan terdiri atas puncak Gunung Seminung (1.964 m), Gunung Dempo (3.159 m), Gunung

Patah (1.107 m) dan Gunung Bengkuk (2.125m). Disebelah Barat Bukit Barisan merupakan lereng. Provinsi Sumatera Selatan mempunyai beberapa sungai besar. Kebanyakan sungai-sungai itu bermata air dari Bukit Barisan, kecuali Sungai Mesuji, Sungai Lalan dan Sungai Banyuasin. Sungai yang bermata air dari Bukit Barisan dan bermuara ke Selat Bangka adalah Sungai Musi, sedangkan Sungai Ogan, Sungai Komering, Sungai Lematang, Sungai Kelingi, Sungai Lakitan, Sungai Rupit dan Sungai Rawas merupakan anak Sungai Musi.

Secara administratif Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 13 (tigabelas) Pemerintah Kabupaten dan 4 (empat) Pemerintah Kota, dengan Palembang sebagai ibukota provinsi. Pemerintah Kabupaten dan Kota membawahi Pemerintah Kecamatan dan Desa / Kelurahan, Provinsi Sumatera Selatan memiliki 13 Kabupaten, 4 Kotamadya, 212 Kecamatan, 354 Kelurahan, 2.589 Desa. Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi Kabupaten dengan luas wilayah terbesar dengan luas 16.905,32 Ha, diikuti oleh Kabupaten Musi Banyuasin dengan luas wilayah sebesar 14.477 Ha.

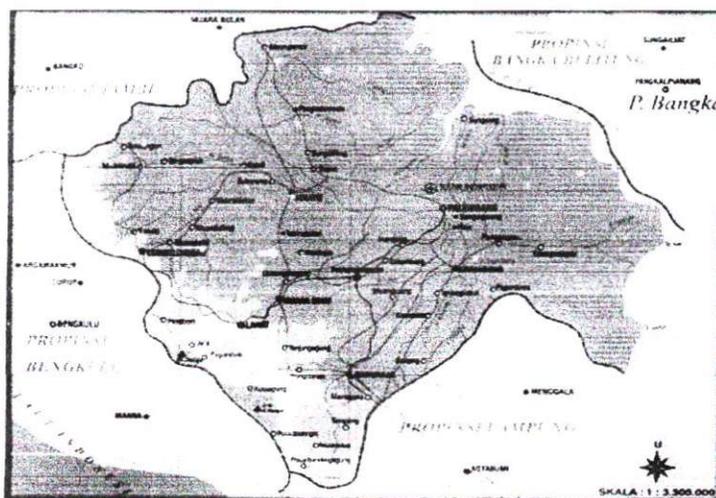
Berdasarkan harga berlaku dengan migas, terdapat empat sektor yang memberikan sumbangan cukup besar terhadap PDRB. Pada tahun 2010, empat sektor yang memberikan sumbangan terbesar adalah sektor industri pengolahan, diikuti oleh sektor pertambangan dan penggalan, sektor pertanian serta sektor perdagangan, Hotel dan

Restoran. Pada Tahun 2010 kontribusi masing-masing sektor diatas secara berurutan adalah 23,67%, 21,62%, 16,85%, 12,70%.

Sebagai salah satu provinsi tujuan investasi, Provinsi Sumatera Selatan memiliki berbagai sarana dan prasarana penunjang diantaranya adalah Bandara S.M. Badaruddin II yang terdapat di Kota Palembang, Bandara Tanjung Enim di Kabupaten Muara Enim, Bandara Banding Agung yang terletak di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Pelabuhan Palembang yang terletak di Kota Palembang juga Pelabuhan Khusus Kertapati di Kabupaten Muara Enim.

b. Pemerintahan

Gambar IV.1
Peta Provinsi Sumatera Selatan



Sumber : Google

Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 17 Kabupaten / Kota, Yaitu: Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ilir, Muara Enim, Musi Banyuasin, Banyuasin, Oku Selatan, Oku Timur, Ogan Ilir, Empat Lawang, Palembang, Prabumulih, Pagar Alam, Lubuk Linggau,

Panukal Abab Lematang Ilir, Musi Rawas Utara. Provinsi Sumatera Selatan memiliki 13 Kabupaten, 4 Kotamadya, 212 Kecamatan, 354 Kelurahan, 2.589 Desa. Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi Kabupaten dengan luas wilayah terbesar dengan luas 16.905,32 Ha, diikuti oleh Kabupaten Musi Banyuasin dengan luas wilayah sebesar 14.477 Ha.

2. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)

1) Sejarah

Dibentuk sesuai amanat Pasal 18A UUD 1945, Pasal 2d, 2e dan 2f Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004, dan Pasal 2 Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah merupakan hal yang penting dan strategis dalam rangka pengelolaan keuangan negara. Hal tersebut mengingat peta pengelolaan keuangan mengikuti kewenangan yang telah diserahkan kepada daerah dimana jumlah dana yang disalurkan ke daerah melalui pos Belanja Untuk Daerah dalam APBN cenderung meningkat setiap tahunnya. Sampai dengan saat ini, tidak ada unit kerja di lingkungan Pemerintah Pusat yang ditugaskan menangani secara khusus pengelolaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara terpadu.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Departemen Keuangan merupakan pengabungan dari beberapa unit eselon II dari Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan (DJAPK)

Badan Pengkajian Ekonomi Keuangan dan Kerjasama Internasional (BAPPEKI) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2006 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia. Dengan terbentuknya unit baru tersebut diharapkan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dapat lebih focus dan terarah sejalan dengan skenario (*road map*) yang telah dicanangkan.

2) Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Departemen Keuangan merupakan pengabungan dari beberapa unit eselon II dari Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan (DJAPK) Badan Pengkajian Ekonomi Keuangan dan Kerjasama Internasional (BAPPEKI) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2006 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia. Dengan terbentuknya unit baru tersebut diharapkan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dapat lebih focus dan terarah sejalan dengan skenario (*road map*) yang telah dicanangkan. Mempunyai tugas pokok “Merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah”.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Departemen Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- c. Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

3) Visi dan Misi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)

VISI

Dalam mengemban tugas dan fungsi, DJPK mempunyai Visi :

”Menjadi Pengelola Hubungan Fiskal Pusat dan Daerah Berkelas Dunia Yang Adil dan Transparan.”

MISI

Guna mewujudkan Visi yang telah ditetapkan tersebut, DJPK melaksanakan Misi sebagai berikut :

- a) Mewujudkan perumusan kebijakan hubungan keuangan pusat dan daerah yang transparan dan akuntabel.

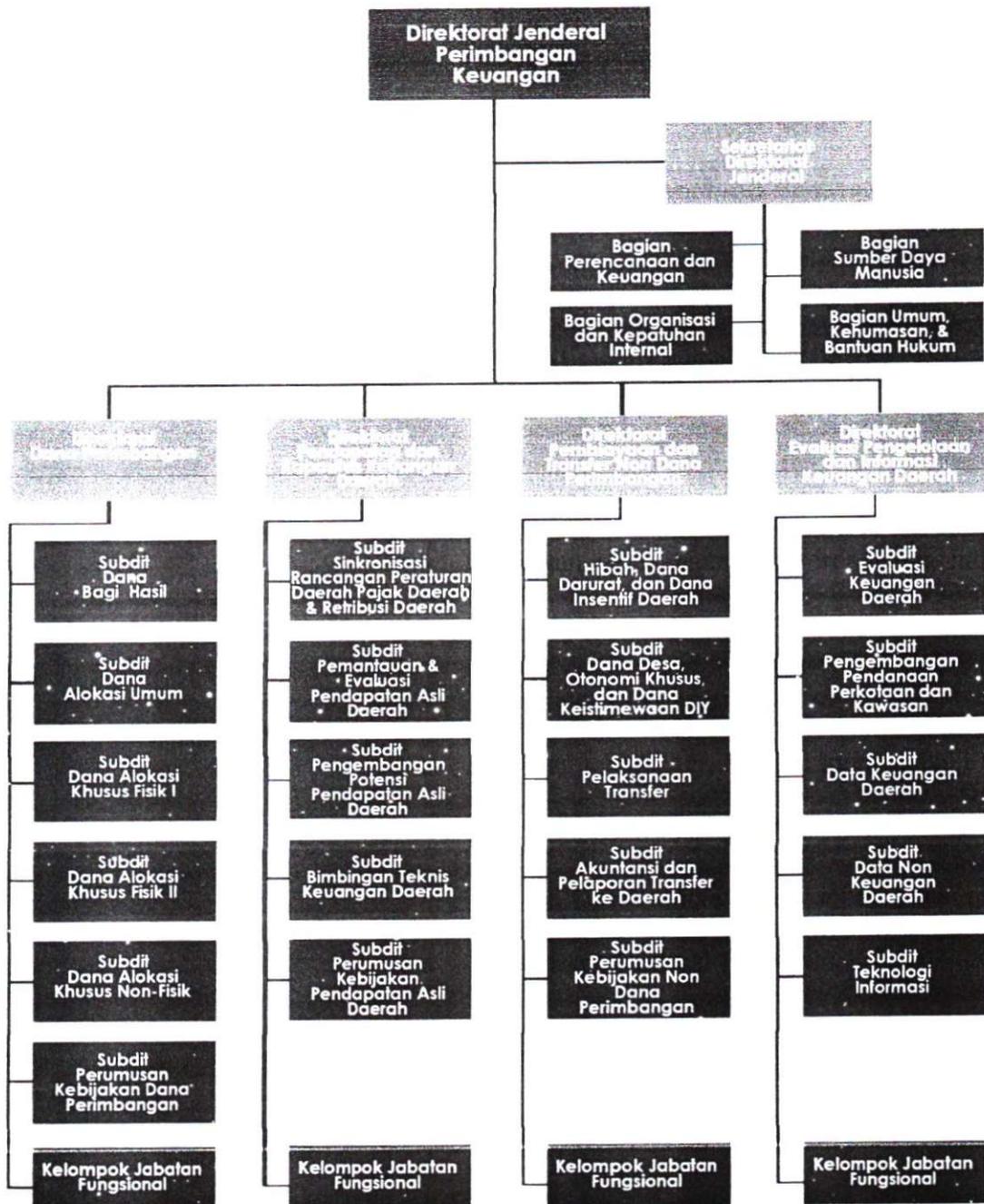
- b) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan hubungan keuangan pusat dan daerah yang efektif.
- c) Menyelenggarakan sistem informasi keuangan daerah yang akurat, transparan, dan tepat waktu.
- d) Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

4) Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)

Struktur organisasi dapat dikatakan baik dan jelas, apabila struktur satuan-satuan organisasi tersebut mencerminkan kegiatan-kegiatan perusahaan dan terdapatnya hubungan antara satuan-satuan organisasi tersebut. Dari hubungan itu akan terlihat sampai mana pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang tenaga kerja dalam menjaikan tugas serta hubungan dengan bagian-bagian dalam perusahaan.

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai struktur organisasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dapat dilihat pada gambar dihalaman berikut ini :

Gambar IV.2
Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)



Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), 2017

Berdasarkan struktur organisasi tersebut, berikut ini akan dijelaskan mengenai uraian tugas dari masing-masing bagian dalam Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) sebagai berikut :

a) Sekretariat Direktorat Jenderal

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan direktorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1186, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- (1) Koordinasi kegiatan direktorat jenderal
- (2) Koordinasi dan fasilitasi penyusunan peraturan di bidang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- (3) Penyelenggaraan pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian, dan keuangan serta pembinaan jabatan fungsional pada direktorat jenderal.
- (4) Koordinasi penyusunan rencana kerja, rencana anggaran, rencana strategik, dan laporan akuntabilitas kinerja direktorat jenderal.
- (5) Koordinasi dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.
- (6) Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pendampingan hukum dan pertimbangan hokum.
- (7) Pelaksanaan tata usaha, kearsipan, dokumentasi, dan perpustakaan direktorat jenderal.

(8) pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan direktorat jenderal.

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- 1) Bagian Perencanaan dan Organisasi;
- 2) Bagian Kepegawaian;
- 3) Bagian Keuangan;
- 4) Bagian Umum; dan
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional.

b) Direktorat Dana Perimbangan

Mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang dana perimbangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1205, Direktorat Dana Perimbangan menyelenggarakan fungsi :

- (1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang dana perimbangan
- (2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang dana perimbangan.
- (3) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang dana perimbangan.
- (4) Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang dana perimbangan
- (5) Pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Direktorat Dana Perimbangan terdiri atas:

- (1) Subdit Dana Bagi Hasil
- (2) Subdit Dana Alokasi Umum

- (3) Subdit Dana Alokasi Khusus Fisik I
 - (4) Subdit Dana Alokasi Khusus Fisik II
 - (5) Subdit Dana Alokasi Khusus Non Fisik
 - (6) Subdit Perumusan Kebijakan Dana Perimbangan
- c) Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah
- mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembiayaan dan kapasitas daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1257, Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi :
- (1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembiayaan dan kapasitas daerah
 - (2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan dan kapasitas daerah.
 - (3) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembiayaan dan kapasitas daerah;
 - (4) Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembiayaan dan kapasitas daerah
 - (5) Pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.
- Direktorat Pembiayaan dan Kapasitas Daerah terdiri atas:
- (1) Subdit Sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - (2) Subdit Pemantauan dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah

(3) Subdit Pengembangan Potensi Pendapatan Asli Daerah

(4) Subdit Bimbingan Teknis Keuangan

(5) Subdit Perumusan Kebijakan Pendapatan Asli Daerah

d) Direktorat pembiayaan Transfer Non Dana Perimbangan

Mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang evaluasi pendanaan dan informasi keuangan daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1281, Direktorat Pembiayaan Transfer Non Dana Perimbangan menyelenggarakan fungsi :

(1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang Pembiayaan Transfer Non Dana Perimbangan

(2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang Pembiayaan Transfer Non Dana Perimbangan.

(3) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Pembiayaan Transfer Non Dana Perimbangan.

(4) Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Pembiayaan Transfer Non Dana Perimbangan.

(5) Pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Direktorat Pembiayaan Transfer Non Dana Perimbangan terdiri atas :

(1) Subdit Hibah, Dana Darurat dan Dana Insentif Daerah

(2) Subdit Dana, Desa, Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan

(3) Subdit Pelaksanaan Transfer

(4) Subdit Akuntansi dan Pelaporan Transfer ke Daerah

(5) Subdit Perumusan Kebijakan Non Dana Perimbangan

e) Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah

Mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang evaluasi pendanaan dan informasi keuangan daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1281, Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi :

(6) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang evaluasi pendanaan dan informasi keuangan daerah

(7) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang evaluasi pendanaan dan informasi keuangan daerah.

(8) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang evaluasi pendanaan dan informasi keuangan daerah;

(9) Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang evaluasi pendanaan dan informasi keuangan daerah.

(10) Pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah terdiri atas :

(6) Subdit Evaluasi Keuangan Daerah

(7) Subdit Pengembangan Pendanaan Perkotaan dan Kawasan

(8) Subdit Data Keuangan Daerah

(9) Subdit Data Non Keuangan Daerah

(10) Subdit Teknologi Informasi

f) **Kelompok Jabatan Fungsional**

Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.
- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

5) Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan

Sumatera Selatan adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di bagian selatan Pulau Sumatera dengan jumlah penduduk pada tahun 2015 sebesar 8.052 jiwa. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan tercatat tumbuh positif ditengah masih melambatnya ekonomi dunia. Realisasi pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan di triwulan I 2016 sebesar 4,94% lebih tinggi dari realisasi pertumbuhan ekonomi di triwulan IV 2015 yang berada pada level 3,94%. Realisasi triwulan ini juga tercatat lebih tinggi dari triwulan I 2015 yang sebesar 4,58%.

Berikut ini data penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011-2014 :

Tabel IV.1
Realisasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2011-2014
(dalam jutaan rupiah)

Kabupaten/Kota	Tahun	PAD	PD	RD
Lahat	2011	70,065	15,728	13,213
	2012	70,937	20,094	17,643
	2013	78,313	24,661	23,597
	2014	128,331	60,867	26,164
Musi Banyuasin	2011	80,644	20,157	8,059
	2012	96,732	18,394	1,615
	2013	112,649	19,681	2,506
	2014	175,937	64,593	5,360
Musi Rawas	2011	65,427	8,496	3,122
	2012	73,018	13,934	2,747
	2013	75,367	18,287	3,408
	2014	123,165	48,861	4,168
Muaraenim	2011	86,937	23,365	13,680
	2012	119,455	28,610	8,917
	2013	125,111	36,251	12,511
	2014	141,718	50,819	14,600
OKI	2011	47,387	13,209	6,749
	2012	54,618	13,590	12,626
	2013	68,701	23,103	20,493
	2014	148,603	83,477	11,598
OKU	2011	42,119	16,422	6,407
	2012	41,429	15,631	11,637
	2013	44,680	17,080	13,607
	2014	82,356	26,899	3,191
Palembang	2011	349,569	207,746	8,519
	2012	518,858	333,104	80,007
	2013	558,705	357,230	106,871
	2014	737,231	466,587	118,318
Prabumulih	2011	32,107	4,278	4,793
	2012	42,679	8,124	1,257
	2013	50,623	14,339	2,118
	2014	66,854	18,727	3,250
Pagar Alam	2011	14,876	2,532	6,284
	2012	34,791	6,151	963
	2013	41,693	17,626	1,845
	2014	53,193	20,870	4,948
Lubuk Linggau	2011	34,302	12,127	10,912
	2012	4,603	3,545	4,575
	2013	81,364	31,069	5,461
	2014	109,930	54,711	30,835
Banyuasin	2011	29,781	10,445	4,922
	2012	67,767	25,771	6,129
	2013	22,080	6,244	24,074
	2014	52,073	13,567	4,981
Ogan Ilir	2011	21,848	6,439	6,797
	2012	31,742	15,635	2,635
	2013	39,918	11,686	3,939
	2014	65,430	20,645	11,133
OKU Timur	2011	30,631	9,817	6,980
	2012	34,833	10,566	14,767
	2013	22,897	5,830	17,630
	2014	36,327	10,424	6,461
OKU Selatan	2011	13,676	2,532	3,100
	2012	18,948	3,648	963
	2013	24,230	8,943	1,845
	2014	35,668	14,880	3,531
Empat Lawang	2011	18,479	6,093	9,360
	2012	21,467	8,426	4,548
	2013	41,356	9,452	2,993
	2014	44,368	12,464	6,348
Jumlah		5,555,596	2,454,482	783,730

Sumber : <http://www.djpk.depkeu.go.id>

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif keseluruhan variabel penelitian yang mencakup nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi adalah seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel IV.2
Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pendapatan Asli Daerah	60	4,603	737,231	92,593.29	131,452.897
Pajak Daerah	60	2,532	466,587	40,908.05	85,900.260
Retribusi Daerah	60	963	118,318	11,919.17	21,876.789
Valid N (listwise)	60				

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah data (N) yang diuji sebanyak 60. Selain itu diperoleh gambaran nilai minimum, maksimum, nilai rata-rata, serta *standar deviasi* masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah

Selama kurun waktu 4 tahun dapat diketahui bahwa jumlah PAD terbesar yaitu Rp.737.231 miliar yang dihasilkan pada tahun 2014 oleh Kota Palembang. Sedangkan jumlah PAD terkecil, yaitu Rp 4.603 miliar dihasilkan oleh Kota Lubuk Linggau pada tahun 2012. Rata-rata PAD yang diterima selama 4 tahun (2011-2014) adalah sebesar Rp.92.593,29 miliar dengan *standar deviasi* sebesar Rp. 131.452.897 miliar.

b. Pajak Daerah

Selama kurun waktu 4 tahun dapat diketahui bahwa jumlah Pajak Daerah terbesar yaitu Rp.466.581 miliar yang dihasilkan pada tahun 2014 oleh Kota Palembang. Sedangkan jumlah Pajak Daerah terkecil, yaitu Rp 2.532 miliar dihasilkan oleh Kota Pagaralam pada tahun 2011. Rata-rata Pajak Daerah yang diterima selama 4 tahun (2011-2014) adalah sebesar Rp.40.908,05 miliar dengan *standar deviasi* sebesar Rp.85.900.260 miliar.

c. Retribusi Daerah

Selama kurun waktu 4 tahun dapat diketahui bahwa jumlah Retribusi Daerah terbesar yaitu Rp.118.318 miliar yang dihasilkan pada tahun 2014 oleh Kota Palembang. Sedangkan jumlah Retribusi Daerah terkecil, yaitu Rp 963 juta dihasilkan oleh Kota Pagaralam pada tahun 2012. Rata-rata Retribusi Daerah yang diterima selama 4 tahun (2011-2014) adalah sebesar Rp.11.919,17 miliar dengan *standar deviasi* sebesar Rp.21.876.789 miliar.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas Residual

Menurut Priyatno (2014 : 90) uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah nilai residual yang digunakan terdistribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua metode yang pertama dengan melihat Uji *One Sample Kolmogorov Smirnov*.

Tabel IV.3
Hasil Uji Normalitas (*One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah	Retribusi Daerah
N		60	60	60
Normal Parameters(a,b)	Mean	92,593.29	40,908.05	11,919.17
	Std. Deviation	131,452.897	85,900.260	21,876.789
Most Extreme Differences	Absolute	.284	.362	.332
	Positive	.284	.362	.332
	Negative	-.257	-.328	-.308
Kolmogorov-Smirnov Z		2.199	2.806	2.568
Asymp. Sig. (2-tailed)		.293	.688	.235

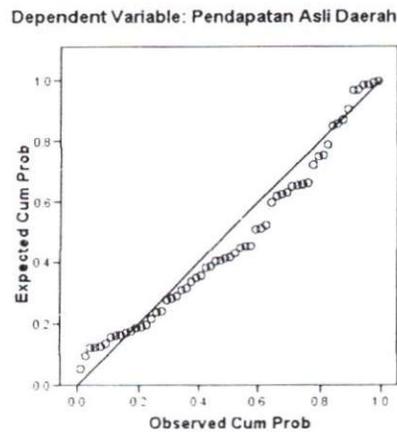
Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS

Berdasarkan hasil pengujian *Kolmogorov-Smirnof*, apabila *Asymp. Sig (2-tailed)* bernilai lebih besar dari 0,05 maka nilai residual dikatakan normal. Pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* pada variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,293, Pajak Daerah sebesar 0.688 dan Retribusi Daerah sebesar 0,235 adalah lebih besar dari 0,05. Hal tersebut membuktikan bahwa nilai residual dalam penelitian ini adalah normal.

Hasil pengujian normalitas dengan melihat penyebaran data pada sumber diagonal pada grafik *Normal P-P Plot of regression standardized residual* dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar IV.3
Hasil Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



b. Uji Multikolinieritas

Berikut ini hasil dari uji multikolinieritas antara variabel-variabel bebas yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.4
Hasil Uji Multikolinieritas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pajak Daerah	.950	1.330
	Retribusi Daerah	.835	1.197

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS

Berdasarkan hasil pengolahan data tersebut di atas, untuk menguji ada tidaknya Multikolinieritas pada model regresi linier dapat dilakukan dengan melihat nilai VIF masing-masing variabel independen dan melihat nilai korelasi antar variabel independen. Menurut Santoso (2009 : 22) Uji multikolinieritas ini dilakukan dengan cara menghitung nilai *Variance Inflating Factor* (VIF),

apabila VIF lebih kecil dari 5 maka berarti tidak terjadi multikolinearitas.

Pada tabel di atas, diketahui bahwa nilai VIF dari masing-masing variabel independen lebih kecil dari pada 5, yaitu nilai VIF variabel pajak daerah sebesar 1,330 dan nilai VIF Variabel Retribusi Daerah sebesar 1,197, Sedangkan pada bagian *Coefficient Correlations*, dapat dilihat bahwa nilai korelasi di antara variabel independen dapat dikatakan mempunyai korelasi yang kuat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa di antara variabel independen tersebut tidak terjadi Multikolinearitas pada model regresi linier berganda.

c. Uji Autokorelasi

Untuk menguji apakah ada dapat deteksi dengan Durbin Watson (DW) Statistik. Menurut Sritua Arif (2006 : 43) apabila nilai Durbin Watson (DW) statistik makin mendekati 2 maka tidak terdapat adanya gejala autokorelasi. Jika DW statistik semakin mendekati 0, maka menunjukkan bahwa terdapat autokorelasi yang positif. Apabila nilai DW statistik mendekati 4 maka terdapat petunjuk adanya autokorelasi negative. Berikut ini dapat dilihat hasil uji autokorelasi sebagai berikut :

Tabel IV.5
Hasil Uji Autokorelasi

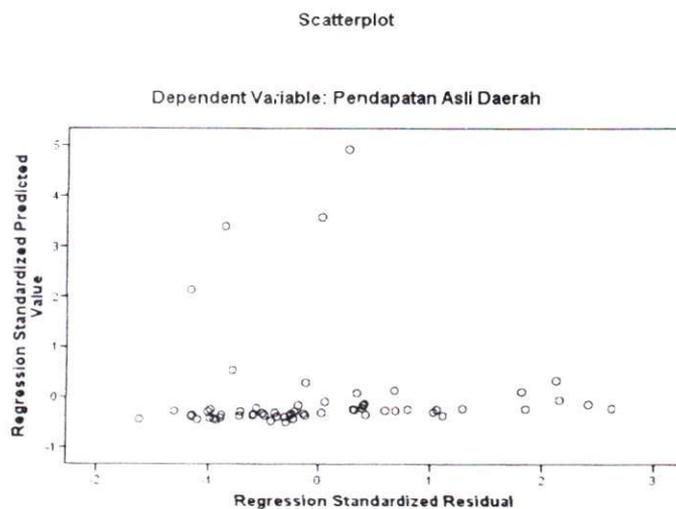
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.990(a)	.980	.979	18,890.160	1.524

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS

Dari tabel Model Summary diatas diperoleh nilai Durbin Watson sebesar 1,524 karena nilai Durbin Watson masih mendekati nilai 2 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

d. Uji Heterokedastisitas

Gambar IV.4
Hasil Uji Heterokedastisitas Menggunakan Scatterplot



Dari hasil output gambar *scatterplot*, didapat titik menyebar di bawah serta di atas sumbu Y, dan tidak mempunyai pola yang teratur. Maka dapat disimpulkan variabel bebas di atas tidak terjadi heteroskedastisitas atau bersifat homoskedastisitas.

3. Regresi Linier Berganda

Untuk menetapkan rumusan persamaan Regresi Linier Berganda pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan perlu dilakukan analisis regresi Regresi Linier Berganda dengan menggunakan fasilitas program SPSS dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.6
Hasil Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta	B	Std. Error
1	(Constant)	32141.388	2786.425		11.535	.000
	Pajak Daerah	1.659	.072	1.084	23.034	.000
	Retribusi Daerah	.622	.283	.104	2.201	.032

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS

Dari tabel diatas ditemukan persamaan regresi linier berganda yaitu :

$$\hat{Y} = 32.141,388 + 1,659 X_1 + 0,622 X_2 + e$$

Konstanta sebesar 32.141,388 menyatakan bahwa jika tidak ada peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Pendapatan Asli Daerah sebesar 32.141,388, sedangkan dengan melihat besarnya koefisien regresi bahwa Pajak Daerah sebesar 1,659 dan Retribusi Daerah sebesar 0,622 artinya kecenderungan proyeksi perubahan antara Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah menunjukkan setiap perubahan atau peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar 100% maka mengakibatkan peningkatan pula pada Pendapatan Asli Daerah sebesar 165,9% dan 62,2%.

4. Uji Hipotesis

a) Uji secara Simultan (Uji F)

Hasil uji F pengaruh penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.7
Hasil Uji F

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.0E+012	2	4.996E+011	1400.036	.000 ^a
	Residual	2.0E+010	57	356838149.3		
	Total	1.0E+012	59			

a. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah

b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS

Tabel diatas menunjukkan hasil uji F sebesar 1400,036 dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena nilai probabilitas (0,000) lebih kecil dari 0,05 dapat dikatakan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama mempengaruhi variabel Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

Dengan demikian Hipotesis diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Ketentuan pengujian hipotesis yaitu jika $\text{sig } F \geq \alpha = 0,05$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, sebaliknya jika $\text{sig } F < \alpha = 0,05$, maka H_1 diterima dan H_0 ditolak.

b) Uji secara Parsial (Uji t)

Hasil uji t pengaruh penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.8
Hasil Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta	B	Std. Error
1	(Constant)	32141.388	2786.425		11.535	.000
	Pajak Daerah	1.659	.072	1.084	23.034	.000
	Retribusi Daerah	.622	.283	.104	2.201	.032

a Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS

Uji t dilakukan untuk menyelidiki lebih lanjut, mana diantara variabel independen yang berpengaruh terhadap PAD. Uji t dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel, taraf signifikansi 5% : 2 = 2,5% (uji 2 sisi) dengan derajat kebebasan (df) = n-k-1 atau 60 -2-1 = 57 (n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel independen). Dengan pengujian 2 sisi (signifikan = 0,025), maka hasil diperoleh untuk t tabel sebesar 2.0024 sehingga didapat hasil pengujian sebagai berikut :

(1) Variabel Pajak Daerah memiliki t hitung sebesar 23,034 dengan taraf signifikan 0,000 di bawah signifikansi 0,05 (5%). Dengan demikian t hitung > t tabel atau 23,034 > 2.0024 Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah mempengaruhi Pendapatan Asli

Daerah. Hal ini membuktikan bahwa hipotesis diterima yaitu terdapat pengaruh Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

- (2) Variabel Retribusi Daerah memiliki t hitung sebesar 2,201 dengan taraf signifikan 0,032 di bawah signifikansi 0,05 (5%). Dengan demikian t hitung $>$ t tabel atau $2,201 > 2.0024$ Sehingga dapat disimpulkan bahwa Retribusi Daerah daerah mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Hal ini membuktikan bahwa hipotesis diterima yaitu terdapat pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

5. Koefisien Determinasi

Hasil Uji Koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel IV.9
Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.990 ^a	.980	.979	18,890.160

a. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS

Dari tabel diatas diketahui bahwa hasil *R square* adalah 0,980 atau 98%. Hal ini menunjukkan bahwa PAD dapat dijelaskan oleh variabel pajak daerah dan retribusi daerah sebesar 98%, sedangkan sisanya 2% (100%-98%) dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti, seperti

hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan yang sah (hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah, komisi, potongan dan keuntungan selisih nilai tukar rupiah, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, denda pajak, denda retribusi, hasil eksekusi atas jaminan, dan lain-lain).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan untuk periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 pada daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan diketahui terjadi trend peningkatan yang fluktuatif dari segi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, pajak daerah maupun retribusi daerahnya. Berdasarkan hasil statistik deskriptif diketahui bahwa Kota Palembang memiliki realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terbesar selama 4 tahun terakhir yakni sebesar Rp.737.231 miliar, 466.587 miliar dan Rp.118.318 milyar yang dihasilkan pada tahun 2014. Sedangkan jumlah Pendapatan Asli Daerah terkecil, yaitu Rp 4.603 miliar dihasilkan oleh Kota Lubuk Linggau pada tahun 2012. Jumlah Pajak Daerah terkecil, yaitu Rp 2.532 miliar dihasilkan oleh Kota Pagaralam pada tahun 2011. Jumlah Retribusi Daerah terkecil, yaitu Rp 963 juta dihasilkan oleh Kota Pagaralam pada tahun 2012.

Sebagaimana diketahui bahwa beberapa daerah di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan realisasi penerimaan pajak daerah dan

retribusi daerah masih kecil pada beberapa Kabupaten/Kota pada periode tahun yang diteliti. Namun, dari hasil penelitian di atas ternyata menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah, baik secara simultan dan parsial.

Hasil uji F sebesar 1400,036 dengan tingkat signifikansi 0,000 karena nilai probabilitas (0,000) lebih kecil dari 0,05 dapat dikatakan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama mempengaruhi variabel Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Variabel Pajak Daerah memiliki t hitung sebesar 23,034 dengan taraf signifikan 0,000 di bawah signifikansi 0,05 (5%). Dengan demikian $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ atau $23,034 > 2.0024$ Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Hal ini membuktikan bahwa hipotesis diterima yaitu terdapat pengaruh Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Variabel Retribusi Daerah memiliki t hitung sebesar 2,201 dengan taraf signifikan 0,032 di bawah signifikansi 0,05 (5%). Dengan demikian $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ atau $2,201 > 2.0024$ Sehingga dapat disimpulkan bahwa Retribusi Daerah daerah mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Hal ini membuktikan bahwa hipotesis diterima yaitu terdapat pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

Nilai koefisien determinasi (*R square*) adalah 0,980 atau 98%. Hal ini menunjukkan bahwa PAD dapat dijelaskan oleh variabel pajak daerah dan retribusi daerah sebesar 98%, sedangkan sisanya 2% (100%-98%) dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti, seperti hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan yang sah (hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah, komisi, potongan dan keuntungan selisih nilai tukar rupiah, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, denda pajak, denda retribusi, hasil eksekusi atas jaminan, dan lain-lain).

Hasil penelitian ini sesuai penelitian Ida Mentayani (2014) yaitu Secara individual variabel pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap PAD secara keseluruhan. Untuk periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 diketahui total keseluruhan realisasi penerimaan pajak daerah untuk 13 Kabupaten/Kota adalah sebesar Rp.558,49 milyar dan total keseluruhan realisasi penerimaan retribusi daerahnya adalah sebesar Rp.586,77 milyar sehingga total kedua penerimaan tersebut adalah sebesar Rp.1.145,26 milyar. Total PAD untuk 13 Kabupaten/Kota selama periode tahun yang diteliti adalah sebesar Rp.2.185,39 milyar. Sehingga dapat diketahui sumbangan dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama kepada PAD adalah sebesar 52,40% dan sisanya adalah sumbangan dari sektor hasil

perusahaan daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan sektor lain-lain PAD yang sah. Besarnya persentase yang dihasilkan oleh pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama sesuai dengan hasil hipotesis yakni uji F yang menghasilkan hasil positif sebesar 80,545 dengan tingkat signifikan (0,000). Hal ini membuktikan dan menerima hipotesis H3 yaitu penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap peningkatan PAD.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi). Dengan demikian usaha peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya ditinjau dari segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia.

Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Data-data yang menyangkut penelitian ini diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Indonesia. Sampel penelitian adalah 15 Kabupaten/kota yang ada di Propinsi Sumatera Selatan dengan data yang diteliti selama 4 tahun (2011-2014).

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan
2. Terdapat pengaruh penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.
3. Terdapat pengaruh penerimaan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan

Tiga kesimpulan di atas mendukung serta memperkuat penelitian sebelumnya oleh Andrian Heryanto (2010) yang menyatakan bahwa peranan pajak dan retribusi daerah terhadap PAD cukup dominan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat sampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebaiknya berkonsentrasi untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah karena dengan peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah akan berpengaruh pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah pemerintah akan semakin mudah membiayai kegiatan-kegiatan dan keperluan daerah yang nantinya akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Selain itu, dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah akan berpengaruh terhadap peningkatan fasilitas-fasilitas bagi masyarakat Propinsi Sumatera Selatan. Dengan kata lain, adanya peningkatan PAD diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Peningkatan PAD harus didukung pula oleh peningkatan kualitas dari para pejabat pemerintahan propinsi maupun kabupaten/kota yang ada di Propinsi Sumatera Selatan. Dengan demikian pajak dan retribusi daerah yang diterima dapat disalurkan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Selain itu perlu diadakan sosialisasi mengenai potensi daerah yang dimiliki oleh Propinsi Sumatera Selatan, sehingga masyarakat dapat lebih mengetahui dan investor lebih tertarik untuk menanamkan

modalnya. Contohnya, sosialisasi mengenai potensi daerah wisata, potensi daerah perkebunan, potensi perikanan air laut maupun air tawar, potensi industri kecil dan menengah yang ada di Propinsi Sumatera Selatan.

2. Bagi Peneliti Lain

Penulis menyadari masih banyak keterbatasan dalam penelitian ini, baik dari segi jumlah sampel yang hanya meliputi 15 kabupaten/kota pada Propinsi Sumatera Selatan, tahun penelitian yang hanya terbatas sampai 4 tahun, serta pembahasan mengenai pendapatan daerah yang hanya berfokus pada pajak daerah dan retribusi daerah. Oleh sebab itu diperlukan penelitian dengan ruang lingkup yang lebih luas, karena hasil yang diperoleh bisa saja berbeda apabila dilakukan pada daerah lain di Indonesia. Agar penelitian ini lebih baik, penelitian lebih lanjut sebaiknya dilakukan dalam kurun waktu lebih dari 5 tahun. Agar penelitian lebih jelas dan lengkap sebaiknya penerimaan daerah lainnya selain pajak daerah dan retribusi daerah juga dijabarkan sehingga dapat dilihat bagaimana pengaruhnya pada Pendapatan Asli Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Nugroho. 2013. *Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2010-2012*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis.
- Bastian, Indra. 2011. *Manual Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. BPFE. Yogyakarta.
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMP. 2014. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Skripsi*.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 3*. Erlangga. Jakarta.
- Ida Mentayani. 2014. *Pengaruh penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis.
- Mardiasmo. 2009. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit ANDI. Yogyakarta.
- _____. 2012. *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi. Yogyakarta.
- Mursyidi. 2009. *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Reflika Aditama. Bandung.
- Resmi, Siti. 2005. *Perpajakan Teori & Kasus*. Salemba Empat. Jakarta.
- Siahaan, Marihot P. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Rajawali. Jakarta.
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta. Bandung
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta. Bandung
- _____. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- _____. UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- _____. UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Lampiran 1 Data Penelitian

Kabupaten/Kota	Tahun	PAD	PD	RD
Lahat	2011	70,065	15,728	13,213
	2012	70,937	20,094	17,643
	2013	78,313	24,661	23,597
	2014	128,331	60,867	26,164
Musi Banyuasin	2011	80,644	20,157	8,059
	2012	96,732	18,394	1,615
	2013	112,649	19,681	2,506
	2014	175,937	64,593	5,360
Musi Rawas	2011	65,427	8,496	3,122
	2012	73,018	13,934	2,747
	2013	75,367	18,287	3,408
	2014	123,165	48,861	4,168
Muaracanim	2011	86,937	23,365	13,680
	2012	119,455	28,610	8,917
	2013	125,111	36,251	12,511
	2014	141,718	50,819	14,600
OKI	2011	47,387	13,209	6,749
	2012	54,618	13,590	12,626
	2013	68,701	23,103	20,493
	2014	148,603	83,477	11,598
OKU	2011	42,119	16,422	6,407
	2012	41,429	15,631	11,637
	2013	44,680	17,080	13,607
	2014	82,356	26,899	3,191
Palembang	2011	349,569	207,746	8,519
	2012	518,858	333,104	80,007
	2013	558,705	357,230	106,871
	2014	737,231	466,587	118,318
Prabumulih	2011	32,107	4,278	4,793
	2012	42,679	8,124	1,257
	2013	50,623	14,339	2,118
	2014	66,854	18,727	3,250
Pagar Alam	2011	14,876	2,532	6,284
	2012	34,791	6,151	963
	2013	41,693	17,626	1,845
	2014	53,193	20,870	4,948
Lubuk Linggau	2011	34,302	12,127	10,912
	2012	4,603	3,545	4,575
	2013	81,364	31,069	5,461
	2014	109,930	54,711	30,835
Banyuasin	2011	29,781	10,445	4,922
	2012	67,767	25,771	6,129
	2013	22,080	6,244	24,074
	2014	52,073	13,567	4,981
Ogan Ilir	2011	21,848	6,439	6,797
	2012	31,742	15,635	2,635
	2013	36,918	11,686	5,959
	2014	65,430	20,645	11,133
OKU Timur	2011	30,631	9,817	6,980
	2012	34,833	10,566	14,767
	2013	22,897	5,830	17,630
	2014	36,327	10,424	6,461
OKU Selatan	2011	13,676	2,532	3,100
	2012	18,948	3,648	963
	2013	24,250	8,945	1,845
	2014	35,668	14,880	3,531
Empat Lawang	2011	18,479	6,093	9,360
	2012	21,467	8,426	4,548
	2013	41,356	9,452	2,993
	2014	44,368	12,464	6,348
Jumlah		5,555,596	2,454,482	783,730

Lampiran 2

Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pendapatan Asli Daerah	60	4,603	737,231	92,593.29	131,452.897
Pajak Daerah	60	2,532	466,587	40,908.05	85,900.260
Retribusi Daerah	60	963	118,318	11,919.17	21,876.789
Valid N (listwise)	60				

Uji Asumsi Klasik

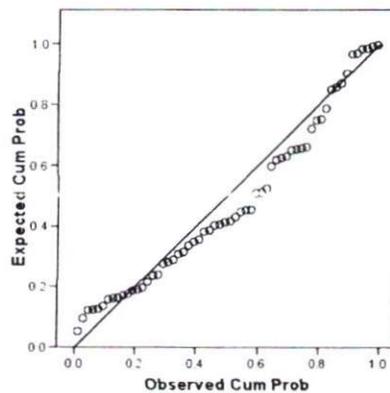
Hasil Uji Normalitas (*One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*)

		Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah	Retribusi Daerah
N		60	60	60
Normal Parameters(a,b)	Mean	92,593.29	40,908.05	11,919.17
	Std. Deviation	131,452.897	85,900.260	21,876.789
Most Extreme Differences	Absolute	.284	.362	.332
	Positive	.284	.362	.332
	Negative	-.257	-.328	-.308
Kolmogorov-Smirnov Z		2.199	2.806	2.568
Asymp. Sig. (2-tailed)		.293	.688	.235

Hasil Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah



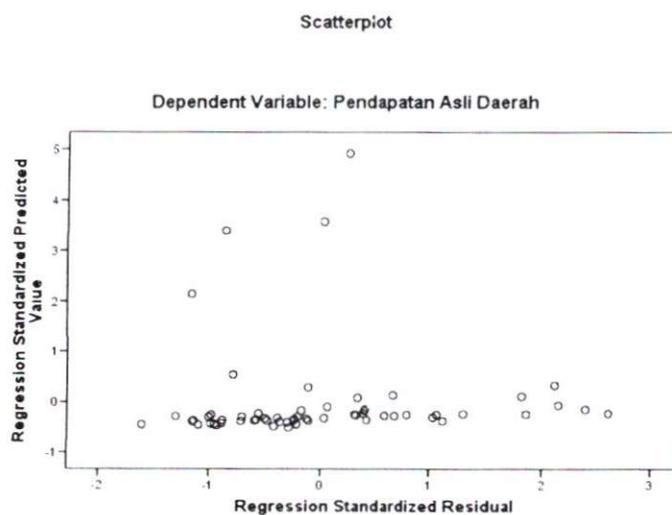
Hasil Uji Multikolinieritas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pajak Daerah	.950	1.330
	Retribusi Daerah	.835	1.197

Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.990(a)	.980	.979	18,890.160	1.524

Hasil Uji Heterokedastisitas Menggunakan Scatterplot



Regresi Linier Berganda

Variables Entered/Removed(b)

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Retribusi Daerah, Pajak Daerah(a)		Enter

a All requested variables entered.

b Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.990(a)	.980	.979	18,890.160

a Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah

ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	999172210 199.198	2	49958610509 9.599	1400.036	.000(a)
	Residual	203397745 10.047		57		
	Total	101951198 4709.244	59			

a Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah

b Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta	B	Std. Error
1	(Constant)	32141.388	2786.425		11.535	.000
	Pajak Daerah	1.659	.072	1.084	23.034	.000
	Retribusi Daerah	.622	.283	.104	2.201	.032

a Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

AKREDITASI

INSTITUSI PERGURUAN TINGGI
PROGRAM STUDI MANAJEMEN (S1)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PEMASARAN (D3)

Nomor : 027 /SK/BAN-PT/Akred /PT/ I / 2014 (B)
Nomor : 044 /SK/BAN-PT/Akred /SI/ I / 2014 (B)
Nomor : 1262 /SK/BAN-PT/Akred/SI/XIII/ 2015 (B)
Nomor : 771 /SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/VIII/ 2015 (B)

bsite : fe.umpalembang.ac.id

Email : febumpplg@umpalembang.ac.id

Alamat : Jalan Jendral Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263 Telp. (0711)511433 Faximile (0711)518018



LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hari/Tanggal : Senin, 27 Februari 2017
Waktu : 13.00 s/d 17.00 WIB
Nama : Mardani Nursali
Nim : 222012110
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi : PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA SELATAN

TELAH DIPERBAIKI DAN DIPERSETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN UNTUK MENGIKUTI WISUDA

NO	NAMA DOSEN	JABATAN	TANGGAL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
1	Drs. Sunardi, S.E, M.Si	Pembimbing	10-3-2017	
2	Drs. Sunardi, S.E, M.Si	Ketua Penguji	10-3-2017	
3	Mizan, S.E, M.Si, Ak., CA	Penguji I	10-3-2017	
4	Lis Djuniar, S.E, M.Si	Penguji II	7-3-2017	

Palembang, Maret 2017

Dekan

u, b Ketua Program Studi Akuntansi



Betri Sirajuddin, S.E, M.Si, Ak., CA
NIDN/NBM:0216106902/944806

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

Unggul dan Islami

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DIBERIKAN KEPADA :

NAMA : MARDANI NURSALI
NIM : 222012110
PROGRAM STUDI : Akuntansi

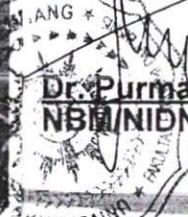
Yang dinyatakan **HAFAL / TAHFIDZ (17)** Surat Juz Amma
di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang

Palembang, Kamis, 28 Juli, 2016
Dekan

Wakil Dekan IV



Dr. Purmansyah Ariadi, M.Hum
NBM/NIDN : 731454/0215126902





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH DALEMDANG

LEMBAGA BAHASA

Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263

Telp. (0711) 512637 - Fax. (0711) 512637

email. lembagabahasaump@yahoo.co.id



TEST OF ENGLISH ABILITY SCORE RECORD

Name : Mardani Nursali
Place/Date of Birth : Sidakersa, March 26th 1994
Test Times Taken : +2
Test Date : February, 03rd 2017

Scaled Score

Listening Comprehension : 55
Structure Grammar : 42
Reading Comprehension : 33
OVERALL SCORE : 433

Palembang, February, 06th 2017

Chairperson of Language Institute

Rini Susanti, S.Pd., M.A

NBM/NIDN. 1164932/0210098402

No. 432/TEA FE/LB/UMP/II/2017



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

STATUS TERAKREDITASI

PIA Q A M

No. 086/H-4/LPKKN/UMP/III/2016

Lembaga Pengelola Kuliah Kerja Nyata (LPKKN) Universitas Muhammadiyah Palembang menerangkan bahwa:

Nama : MARDANI NURSALI
Nomor Pokok Mahasiswa : 222012110
Fakultas : EKONOMI
Tempat Tgl. Lahir : SIDAKERSA, 26-03-1994

telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata Tematik Posdaya Angkatan ke-10 yang dilaksanakan dari tanggal 20 Januari sampai dengan 3 Maret 2016 bertempat di:

Kelurahan/Desa : Sungai Selincah (D)
Kecamatan : Kalidoni
Kota/Kabupaten : Palembang
Dinyatakan : Lulus

Mengetahui
Rektor



Dr. Abid Dzazuli, S.E., M.M.



Palembang, 14 Maret 2016
Ketua LPKKN,

Ir. Athanannasir, M.Si.



GALERI INVESTASI
BURSA EFEK INDONESIA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Indonesia Stock Exchange
Bursa Efek Indonesia

Jln. Ahmad Yani 13 Ulu Palembang (30263) Telp. 0711 – 513022 Fax. 0711 - 513078

Nomor : 69 /R-63/GI.BEI UMP/II/2017
Lampiran : -
Perihal : **Surat Keterangan Riset**

Palembang, 13 Jumadil Awal 1438 H
10 Februari 2017 M

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi UMP
di-
Palembang

Assalamu'alaikum, wr, wb.

Ba'da salam semoga Allah SWT selalu senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari, Amiin.

Kami sampaikan kepada Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang bahwa mahasiswa di bawah ini dengan:

Nama : Mardani Nursali
NIM : 22 2012 110
Jurusan : Akuntansi

Telah melakukan pengambilan data melalui website [www.http://djpk.depkeu.go.id](http://djpk.depkeu.go.id) dan diketahui oleh pojok Bursa Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Billahi fii sabililhaq fastabiqul khairat
Wasalamu'alaikum, wr, wb.

Mengetahui,
Ketua Galeri Investasi BEI UMP


Erlita Safitri, S.E., M.Si.
PALEMBANG Telp. : 0225126801
GALERI INVESTASI BEI



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA :	Mardani Nursali	PEMBIMBING	
NIM :	22 2012 110	KETUA :	Drs. Sunardi, S.E., M.Si
PROGRAM STUDI :	Akuntansi	ANGGOTA :	
JUDUL SKRIPSI :	Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan		

NO.	TGL/PLN/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1.	27-1-2017	Bab I. II. III			Pabrik
2.	30-1-2017	Bab I. II. III			Reo
3.	2-2-2017	Bab IV			Pabrik
4.	6-2-2017	Bab IV			Pabrik
5.	7-2-2017	Bab IV			Pabrik
6.	10-2-2017	Bab IV. V			Reo
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					

CATATAN

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan skripsi, 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditandatangani di : Palembang
 Tanggal :

Betri Sirajuddin, S.E., M.Si. Ak., CA

SURAT KETERANGAN

No. 325/Abstract/LB/UMP/III/2017

Yang ber'andatangan dibawah ini:

Nama : FINZA LARASATI, S.Pd., M.Pd.
Status : Dosen FKIP UMP Program Studi Bahasa Inggris
NIDN : 0220088901
Alamat : Jl. Cinde Welan Lr.Kebon No.41 RT.12A RW.03 Palembang
No. Telpon : 0813-80004861

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa dengan:

Nama : Mardani Nursali
NIM : 222012110
Judul skripsi : Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

Telah dikoreksi terjemahan abstraknya sehingga telah memenuhi kriteria penulisan abstrak dalam Bahasa Inggris.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 07 Maret 2017



Finza Larasati, S.Pd., M.Pd.

BIODATA

Nama : Mardani Nursali
NIM : 22 2012 110
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tgl Lahir : Sidakersa, 26 Maret 1994
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Lengkap : Lorong Arman Lingkungan II Kelurahan Sidakersa
Kayuagung
Pendidikan : SD Negeri 20 Kayuagung
SMP Negeri 1 Kayuagung
SMA Negeri 1 Kayuagung
No Telp/HP : 082281978449
Email : danimn6983@gmail.com
Pekerjaan : Mahasiswa
Nama Orang Tua
Ayah : Muhammad Nur, S.Sos
Ibu : Sarinah
Pekerjaan Orang Tua
Ayah : Pegawai Negeri Sipil
Ibu : Pegawai Negeri Sipil
Alamat Orang Tua : Lorong Arman Lingkungan II Kelurahan Sidakersa
Kayuagung

Penulis

Mardani Nursali